

Pemetaan Pelaku Usaha Desa Sebagai Dasar Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten

¹Muhammad Nur Attho'ilah, ²Sheila Devi Nurhaliza, ³Dafa Hazril Ilhami, ⁴Brian Sofin
Ramadhan, ⁵Chaerani Azzahra, ⁶Ella Rosa Nur Aghesi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168.

¹athoillah495@gmail.com*, ²halizasheila112@gmail.com, ³dafaahazz@gmail.com, ⁴ellarsna245@gmail.com, ⁵briansofin12@gmail.com,

⁶chaeraniiazzahraa@gmail.com.

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 18 – 08 – 2026

Revised 07 – 10 – 2026

Accepted 08 – 10 – 2026

Keywords

Pemetaann Pelaku Usah Desa
UMKM

Participatory Rural Appraisal

Roadmap Ekonomi

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memetakan pelaku usaha Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten sebagai dasar penyusunan roadmap pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan dilatarbelakangi oleh belum tersedianya basis data pelaku usaha yang lengkap, terintegrasi, dan mudah diperbarui oleh pemerintah desa. Kegiatan dilaksanakan pada 29 Juni hingga 22 Juli 2026 dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses identifikasi, pengumpulan, verifikasi, dan validasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendataan langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 192 unit usaha dan potensi ekonomi yang tersebar di wilayah Desa Jonggrangan. Sektor UMKM menjadi potensi ekonomi yang paling dominan dengan 104 unit usaha atau 54,17%, diikuti sektor jasa sebanyak 57 unit usaha atau 29,69% dan perdagangan sebanyak 23 unit usaha atau 11,98%. Hasil pemetaan juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tersebar pada seluruh wilayah yang menjadi lokasi pemetaan dan didominasi oleh usaha kuliner, perdagangan, jasa, serta industri rumah tangga. Kegiatan menghasilkan database pelaku usaha, peta digital persebaran potensi ekonomi, papan informasi potensi ekonomi desa, serta roadmap pengembangan ekonomi desa. Hasil tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam memperoleh data ekonomi yang lebih terstruktur dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, sementara masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai potensi dan peluang pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemetaan ekonomi secara partisipatif dapat menjadi instrumen praktis untuk memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi lokal.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Pembangunan desa adalah bagian yang tidak mungkin lepas dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, namun juga pada penguatan sektor ekonomi masyarakat sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara

mandiri melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar proses tersebut berjalan secara efektif, pemerintah desa tentunya membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan.

Salah satu unsur data yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa adalah data pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan aktor utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi desa melalui berbagai sektor, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, industri rumah tangga, jasa, pertanian, maupun peternakan. Informasi mengenai identitas pelaku usaha, jenis usaha, lokasi usaha, skala usaha, dan karakteristik usaha menjadi dasar penting dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi, penyaluran bantuan, pembinaan usaha, hingga penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran (Mansuri & Rao, 2013).

Urgensi basis data pelaku usaha juga tercermin dalam kebijakan nasional melalui Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pusat Statistik. Program tersebut bertujuan membangun basis data tunggal (*single data*) koperasi dan UMKM berdasarkan nama, alamat, serta karakteristik usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan, penetapan penerima manfaat, pemantauan perkembangan usaha, dan evaluasi program pemberdayaan UMKM. Informasi yang dihimpun meliputi identitas pelaku usaha, karakteristik usaha, tenaga kerja, legalitas usaha, hingga tingkat digitalisasi usaha sehingga mampu memberikan gambaran kondisi riil pelaku usaha di lapangan

(Indonesia, 2023).

Ketersediaan data pelaku usaha yang akurat menjadi salah satu prasyarat dalam penerapan *evidence-based planning*, yaitu proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah desa menentukan prioritas program berdasarkan kondisi nyata masyarakat, mengidentifikasi kelompok usaha yang memerlukan pendampingan, serta meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan data sering menyebabkan program pemberdayaan ekonomi kurang tepat sasaran karena belum didukung informasi yang memadai mengenai kondisi pelaku usaha di wilayah desa (Budiantoro et al., 2023).

Selain mendukung proses perencanaan, pendataan pelaku usaha juga berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Basis data yang tersusun secara sistematis memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pembaruan informasi secara berkala, memantau perkembangan usaha masyarakat, serta menyediakan informasi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan data yang terintegrasi melalui sistem informasi desa juga mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung transparansi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Penelitian mengenai Sistem Informasi Desa (SI Desa) menunjukkan bahwa pengelolaan data ekonomi yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan informasi sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Budiantoro et al., 2023).

Pendataan pelaku usaha juga memiliki manfaat yang luas bagi pengembangan ekonomi lokal. Data mengenai jenis usaha, persebaran lokasi usaha, skala usaha, serta karakteristik pelaku usaha dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor usaha yang berkembang, mengetahui kebutuhan pendampingan, serta mendukung penyusunan program pemberdayaan yang lebih terarah. Di sisi lain, informasi tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun lembaga lain dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. Oleh karena itu, keberadaan basis data pelaku usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen

administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan (UMKM, 2023).

Selain berperan sebagai instrumen administratif, pemanfaatan teknologi informasi geospasial turut menjadi pendekatan strategis dalam penyusunan basis data spasial desa. Pemetaan desa diperlukan untuk menyediakan data spasial pada skala besar yang dapat mendukung perencanaan, pembangunan, dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan batas wilayah dan tata ruang. Pemetaan juga menjadi instrumen untuk mempercepat inventarisasi sumber daya pada tingkat administrasi terkecil (Surdia et al., 2022). Dalam konteks pengembangan ekonomi desa, informasi spasial tersebut dapat melengkapi data pelaku usaha dengan menunjukkan lokasi persebaran aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga potensi dan karakteristik usaha di suatu wilayah dapat diidentifikasi secara lebih jelas.

Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup beragam. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa, aktivitas ekonomi masyarakat meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, industri rumah tangga, jasa, pertanian, dan peternakan. Keberagaman sektor usaha tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan (Budiantoro et al., 2023). Namun demikian, pemerintah desa belum memiliki basis data pelaku usaha yang tersusun secara lengkap dan terintegrasi. Informasi mengenai jumlah pelaku usaha, jenis usaha, lokasi usaha, maupun karakteristik usaha masih tersebar dalam berbagai dokumen dan belum terdokumentasi dalam satu sistem data yang mudah diperbarui maupun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keterbatasan data, tetapi juga pada kapasitas pemerintah desa dalam mengelola informasi ekonomi secara mandiri. Selama ini, pendataan yang dilakukan bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, sehingga pemerintah desa belum memiliki sistem pengelolaan data yang melembaga. Akibatnya, setiap kali diperlukan data pelaku usaha baik untuk keperluan perencanaan pembangunan, pengajuan proposal bantuan, maupun pelaporan program pemerintah desa harus melakukan pendataan ulang dari awal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak tidak hanya akan tersedianya data, tetapi juga akan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola basis data secara berkelanjutan.

Berbagai kegiatan pendataan pelaku usaha di desa sering kali berhenti pada tahap penghasilan dokumen, tanpa diikuti dengan penguatan kapasitas mitra untuk mengelola data tersebut secara mandiri. Pendekatan yang bersifat *top-down* dan seremonial menyebabkan data yang dihasilkan tidak terpelihara, tidak diperbarui, dan akhirnya tidak dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan. Padahal, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, keberhasilan kegiatan pengabdian tidak hanya diukur dari tersedianya output (dokumen, peta, atau database), tetapi juga dari adanya perubahan kapasitas (*outcome*) pada mitra sasaran. Pemerintah desa sebagai mitra utama seharusnya tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga subjek yang mampu mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data secara mandiri setelah kegiatan pengabdian berakhir (Chandra, 1994; Mansuri & Rao, 2013).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengabdian yang menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perancangan instrumen, pengumpulan data, verifikasi, validasi, hingga pelembagaan pengelolaan data. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan, tetapi juga membangun kapasitas mitra untuk mengelola data secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyediaan data, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan pemerintah desa mengelola basis data secara mandiri pasca-kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan pemberdayaan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Pemerintah Desa Jonggrangan melalui pemetaan partisipatif pelaku usaha sebagai dasar penyusunan roadmap pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Secara lebih spesifik, kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Menyusun basis data pelaku usaha yang lengkap, terverifikasi, dan mudah diperbarui melalui pendataan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola basis data pelaku usaha secara mandiri, yang diukur melalui peningkatan pemahaman, keterampilan mengedit data, dan kesepakatan pelebagaan data di tingkat desa.
3. Menyusun roadmap pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan hasil pemetaan, analisis sektor unggulan, dan sebaran usaha pada setiap wilayah dusun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perancangan instrumen pendataan, FGD pemetaan swadaya, verifikasi dan validasi data, penyusunan analisis SWOT kolaboratif, hingga pelebagaan pengelolaan data. Berbeda dengan pendataan konvensional yang bersifat *top-down*, pendekatan ini memastikan adanya transfer pengetahuan dan keterampilan kepada mitra sehingga hasil kegiatan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan pasca-kegiatan.

Luaran yang dihasilkan berupa database pelaku usaha, profil pelaku usaha, peta persebaran pelaku usaha, papan informasi potensi ekonomi desa, dan roadmap pengembangan ekonomi desa. Selain luaran tersebut, kegiatan ini juga menghasilkan outcome berupa peningkatan kapasitas mitra, yang ditunjukkan oleh kemampuan perangkat desa dalam mengelola database, kesepakatan pelebagaan data melalui Berita Acara Komitmen, serta ditetapkannya pengelola data di tingkat desa. Dengan demikian, hasil kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang memberdayakan pemerintah desa dalam penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berkelanjutan.

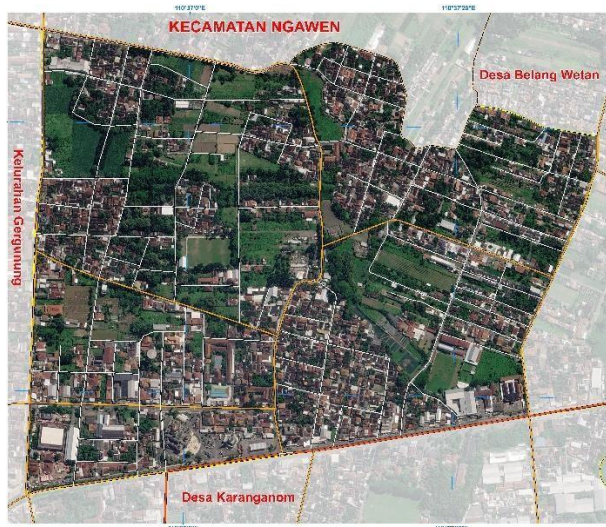
2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan data yang akurat melalui keterlibatan langsung pelaku usaha dan pemerintah desa dalam proses identifikasi, pengumpulan, verifikasi, dan validasi data sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan (Chambers, 1994). Untuk memastikan penerapan PRA secara substantif dan bukan sekadar klaim metodologis, tahapan kegiatan dirancang sebagai berikut:

2.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yaitu pada 29 Juni hingga 22 Juli 2026. Desa Jonggrangan dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah desa yang menunjukkan perlunya pendataan pelaku usaha sebagai upaya penyusunan basis data ekonomi desa. Berdasarkan observasi awal, desa ini memiliki berbagai jenis usaha yang berkembang, meliputi usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, industri rumah tangga, jasa, pertanian, serta peternakan. Namun, data mengenai pelaku usaha masih belum terdokumentasi secara lengkap dan terintegrasi sehingga diperlukan kegiatan pendataan yang sistematis untuk mendukung penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

2.2. Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Jonggrangan sebagai mitra utama serta masyarakat yang memiliki aktivitas usaha di wilayah desa. Responden meliputi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang, pelaku industri rumah tangga, penyedia jasa, petani yang menjalankan usaha komersial, peternak, serta pelaku usaha lainnya.

Pendataan dilakukan dengan pendekatan sensus (*total enumeration*), yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha di Desa Jonggrangan menjadi sasaran pendataan. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan bertujuan memperoleh data pelaku usaha secara menyeluruh dan membangun basis data yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, kegiatan tidak menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mewakili populasi, tetapi berupaya mendata seluruh pelaku usaha yang ditemukan di wilayah Desa Jonggrangan (Indonesia, 2023).

2.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan data yang akurat melalui keterlibatan langsung pelaku usaha dan pemerintah desa dalam proses identifikasi, pengumpulan, verifikasi, dan validasi data sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan (Chambers, 1994). Pendekatan ini juga mendukung proses pengumpulan data secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

2.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan ketercapaian proses, luaran, dan outcome bagi Pemerintah Desa Jonggrangan sebagai mitra utama. Indikator tidak hanya diarahkan pada tersusunnya data pelaku usaha, tetapi juga pada keterlibatan mitra dalam proses verifikasi, pemanfaatan hasil pemetaan, serta keberlanjutan pengelolaan data setelah kegiatan selesai.

Pada aspek proses, keberhasilan ditunjukkan melalui keterlibatan Pemerintah Desa Jonggrangan dalam koordinasi, pemberian informasi lokal, verifikasi data, pembahasan hasil pemetaan, serta proses penyerahan hasil kegiatan. Pada aspek luaran, keberhasilan ditunjukkan

dengan tersusunnya database pelaku usaha, peta digital persebaran usaha, papan informasi, dan roadmap pengembangan ekonomi desa.

Pada aspek outcome, keberhasilan ditunjukkan melalui adanya pemahaman dan keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan serta pembaruan data pelaku usaha, adanya penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data, serta tersusunnya mekanisme pembaruan data secara berkala. Indikator tersebut digunakan untuk melihat apakah hasil kegiatan dapat dimanfaatkan oleh mitra dan tidak berhenti sebagai dokumen hasil pengabdian.

2.5. Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara formatif dan sumatif untuk menilai keterlaksanaan kegiatan, keterlibatan mitra, ketercapaian luaran, serta peluang keberlanjutan pemanfaatan hasil kegiatan.

Evaluasi formatif dilakukan selama proses pendataan melalui observasi lapangan, catatan kegiatan, pemeriksaan kelengkapan data, dan komunikasi dengan perangkat desa. Evaluasi ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan sesuai kebutuhan dan informasi yang diperoleh dapat diverifikasi. Apabila ditemukan data yang belum lengkap atau memerlukan klarifikasi, dilakukan pengecekan kembali kepada pelaku usaha atau pihak yang mengetahui kondisi wilayah setempat.

Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir kegiatan dengan menilai ketercapaian luaran dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Desa Jonggrangan. Aspek yang dinilai meliputi kelengkapan database, kesesuaian peta dengan data lapangan, keterlaksanaan penyerahan hasil, pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan data, serta adanya pembagian peran dalam pemeliharaan data.

Umpan balik mitra diperoleh melalui diskusi bersama Pemerintah Desa Jonggrangan mengenai akurasi data, kemudahan pemanfaatan hasil pemetaan, kebutuhan pembaruan data, dan pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data setelah kegiatan berakhir. Hasil diskusi tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan mekanisme keberlanjutan pengelolaan database dan peta digital.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif yang berasal dari hasil pendataan disajikan dalam bentuk jumlah dan persentase, sedangkan informasi hasil observasi, diskusi, dan catatan lapangan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi keterlibatan mitra, manfaat kegiatan, kendala, dan mekanisme keberlanjutan.

2.6. Instrumen Pengumpulan Data & Tahapan Pelaksanaan

Untuk memastikan penerapan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) berjalan secara substantif, kegiatan ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang dirancang secara partisipatif dan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis.

a. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data disusun melalui lokakarya partisipatif yang melibatkan tim pengabdian, perangkat desa (Sekretaris Desa dan Kepala Dusun), serta perwakilan pelaku usaha. Instrumen yang digunakan meliputi:

No	Instrumen	Deskripsi	Pengguna
----	-----------	-----------	----------

2	Panduan wawancara semi-terstruktur	Digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang kondisi usaha, kendala, dan potensi pengembangan	Tim pengabdian
3	Lembar observasi lapangan	Digunakan untuk mencatat kondisi fisik usaha, lokasi, dan aktivitas ekonomi	Tim pengabdian, kader dusun
4	Panduan FGD pemetaan swadaya	Digunakan untuk memandu diskusi kelompok dalam mengidentifikasi lokasi usaha dan potensi ekonomi wilayah	Tim pengabdian, perangkat desa
5	Panduan FGD analisis SWOT	Digunakan untuk memandu diskusi kolaboratif dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan UMKM	Tim pengabdian, perangkat desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat
6	Lembar verifikasi data	Digunakan untuk memverifikasi kesesuaian data yang terkumpul dengan kondisi lapangan	Tim pengabdian, perangkat desa

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui lima tahap yang menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra aktif:

Tahap 1: Persiapan dan Perancangan Instrumen Partisipatif

- **Kegiatan:** Koordinasi awal dengan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan data, dan lokakarya perancangan instrumen pendataan.
- **Partisipasi mitra:** Perangkat desa dilibatkan dalam menentukan variabel data, format pendataan, dan indikator yang sesuai dengan kebutuhan administrasi desa.
- **Luaran:** Instrumen pendataan yang disepakati bersama.
- **Waktu:** Minggu ke-1.

Tahap 2: Pemetaan Swadaya (*Participatory Mapping*)

- **Kegiatan:** FGD pemetaan swadaya di setiap dusun untuk mengidentifikasi lokasi usaha, sektor unggulan, dan potensi ekonomi wilayah.
- **Partisipasi mitra:** Warga dan pelaku usaha di setiap dusun terlibat aktif dalam menggambar peta sketsa dusun, menandai lokasi usaha, dan mengidentifikasi potensi ekonomi.
- **Luaran:** Peta sketsa dusun hasil pemetaan swadaya.
- **Waktu:** Minggu ke-2.

Tahap 3: Pengumpulan dan Verifikasi Data

- **Kegiatan:** Pendataan langsung ke pelaku usaha menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan.
- **Partisipasi mitra:** Perangkat desa dan kader dusun mendampingi tim dalam pendataan, membantu komunikasi dengan pelaku usaha, dan memberikan informasi lokal.
- **Luaran:** Data pelaku usaha yang terkumpul.
- **Waktu:** Minggu ke-2 hingga ke-3.

Tahap 4: Validasi dan Analisis Kolaboratif

- **Kegiatan:** Lokakarya validasi data dan FGD analisis SWOT kolaboratif.
- **Partisipasi mitra:** Perangkat desa, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat terlibat dalam memvalidasi data, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta merumuskan strategi pengembangan UMKM.
- **Luaran:** Data tervalidasi dan dokumen analisis SWOT kolaboratif.
- **Waktu:** Minggu ke-3.

Tahap 5: Diseminasi, Pelatihan, dan Penyerahan

- **Kegiatan:** Diseminasi hasil, pelatihan pengelolaan database, dan seremoni penyerahan disertai penandatanganan berita acara komitmen.
- **Partisipasi mitra:** Perangkat desa mengikuti pelatihan pengeditan data pada Google Maps dan Excel, menandatangani berita acara komitmen, dan menerima penyerahan database, peta, dan roadmap.
- **Luaran:** Database, peta digital, papan informasi, roadmap, dan berita acara komitmen.
- **Waktu:** Minggu ke-4.

c. Matriks Partisipasi Mitra

Untuk memperjelas tingkat partisipasi mitra dalam setiap tahap, disajikan matriks partisipasi sebagai berikut:

Tahap	Bentuk Partisipasi Mitra	Tingkat Partisipasi
Persiapan	Perangkat desa terlibat dalam perancangan instrumen	Kolaboratif
Pemetaan Swadaya	Warga dan pelaku usaha menggambar peta sketsa dusun	Partisipatif
Pengumpulan Data	Perangkat desa dan kader dusun mendampingi pendataan	Partisipatif
Validasi & Analisis	Perangkat desa, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat memvalidasi data dan menyusun SWOT	Kolaboratif

Diseminasi & Penyerahan	Perangkat desa mengikuti pelatihan dan menandatangani komitmen	Kolaboratif
-------------------------	--	-------------

Keterangan Tingkat Partisipasi:

- Partisipatif: Mitra terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.
- Kolaboratif: Mitra terlibat aktif dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

d. Dokumentasi Proses Partisipatif

Seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan untuk membuktikan adanya keterlibatan mitra secara substantif. Dokumentasi meliputi:

1. Foto lokakarya perancangan instrumen bersama perangkat desa;
2. Foto FGD pemetaan swadaya di setiap dusun;
3. Foto proses verifikasi data bersama kader dusun;
4. Foto pelatihan pengeditan data pada Google Maps dan Excel;
5. Foto seremoni penyerahan database disertai penandatanganan berita acara komitmen.

Dokumentasi ini dilampirkan pada bagian Hasil dan Pembahasan untuk menunjukkan bahwa kegiatan tidak bersifat seremonial, melainkan benar-benar melibatkan mitra dalam proses pemberdayaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi dan Penerapan Pelaku Usaha Desa Jonggrangan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pendataan pelaku usaha yang dilakukan di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, diketahui bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berkembang cukup beragam dan didukung oleh lokasi desa yang strategis. Kedekatan Desa Jonggrangan dengan kawasan perkotaan Klaten serta akses yang mudah terhadap jalur utama Solo–Yogyakarta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi produktif. Kondisi ekonomi masyarakat tidak hanya bertumpu pada satu sektor tertentu, melainkan didukung oleh berbagai jenis usaha yang dijalankan secara mandiri maupun berbasis rumah tangga. Aktivitas ekonomi yang berkembang mencakup sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa, perdagangan, industri rumah tangga, serta peternakan. Keragaman sektor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan potensi lokal dan peluang pasar yang tersedia.

Secara umum, sebagian besar usaha yang dijalankan masih berada pada skala mikro dan kecil dengan jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas. Meskipun demikian, mayoritas pelaku usaha menunjukkan kondisi usaha yang stabil dan memiliki peluang untuk terus berkembang. Selain mengandalkan pemasaran secara langsung, sebagian pelaku usaha juga mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pengembangan ekonomi desa yang cukup besar apabila didukung melalui program pemberdayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta penguatan akses pasar secara berkelanjutan.

Diskusi bersama Pemerintah Desa Jonggrangan dilakukan untuk membahas bagaimana hasil pemetaan pelaku usaha dapat dimanfaatkan dan dipertahankan dalam jangka Panjang. Dalam diskusi tersebut, perangkat desa diberikan pemahaman mengenai pengelolaan serta pembaruan data melalui Google Maps dan Excel, sehingga data yang tersedia dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan

informasi mengenai pelaku usaha. Diskusi ini juga mencakup pengelolaan data, penentuan pihak yang bertanggung jawab, serta perlunya pembaruan rutin agar database tetap relevan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program pengembangan ekonomi desa. Melalui diskusi dan kesepakatan bersama tersebut, diharapkan pengelolaan data tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Desa Jonggrangan setelah rangkaian kegiatan berlanjut.



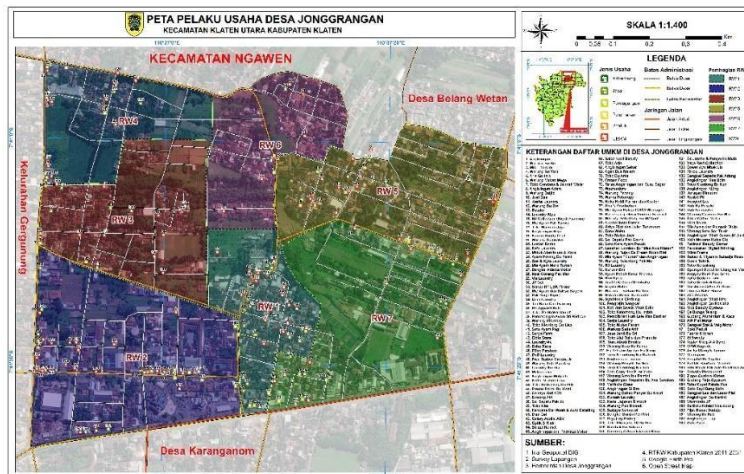
Gambar 2. Briefing Pembagian Lokasi

Kegiatan pendaftaran UMKM ke platform Google Maps dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pembuatan atau penggunaan akun Google, pencarian lokasi usaha pada Google Maps, proses klaim bisnis, pengisian informasi profil usahan secara lengkap, serta verifikasi akun untuk memastikan data usaha telah terdaftar berjalan dengan benar.



Gambar 3. Pendampingan Input Lokasi UMKM ke Google Maps

Berdasarkan hasil pendataan lapangan, teridentifikasi sebanyak 192 unit usaha dan pelaku usaha yang tersebar di wilayah Desa Jonggrangan. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi pelaku usaha yang paling dominan dengan jumlah 104 unit usaha (54,17%), diikuti sektor jasa sebanyak 57 unit usaha (29,69%) dan sektor perdagangan sebanyak 23 unit usaha (11,98%). Selain itu, ditemukan pula pelaku usaha pada sektor industri, percetakan, peternakan, serta usaha produksi rumah tangga dalam jumlah yang lebih terbatas. Dominasi sektor UMKM menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Desa Jonggrangan bertumpu pada usaha skala mikro dan kecil yang berperan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas UMKM perlu menjadi salah satu fokus utama dalam roadmap pengembangan ekonomi desa.



Gambar 4. Peta Sebaran Pelaku Usaha Desa Jonggrangan

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa usaha yang berkembang di Desa Jonggrangan didominasi oleh sektor kuliner dan perdagangan. Berbagai bentuk usaha kuliner yang ditemukan antara lain warung makan, produksi roti, makanan ringan, serta usaha catering skala rumah tangga. Selain itu, sektor perdagangan juga berkembang cukup pesat melalui keberadaan toko kelontong, usaha sembako, dan berbagai aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari. Di samping kedua sektor tersebut, masyarakat juga mengembangkan usaha jasa seperti laundry, servis elektronik, bengkel, dan percetakan, serta usaha produksi rumah tangga seperti mebel dan kerajinan. Dominasi usaha kuliner dan perdagangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat cenderung berpusat pada pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari dan didukung oleh letak Desa Jonggrangan yang strategis di kawasan perkotaan Klaten.

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam pemetaan sebaran pelaku usaha juga telah diterapkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Indonesia. Pemetaan sebaran UMKM berbasis WebGIS DI Desa Pasuruan, Lampung Selatan, misalnya, dilakukan dengan mengintegrasikan titik koordinat, jenis usaha, serta dokumentasi visual pelaku usaha ke dalam peta digital. Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pendataan dan pemantauan perkembangan UMKM, termasuk pada wilayah yang relatif terpencil (Sitorus et al., 2021). Penerapan pemetaan berbasis GIS pada kegiatan pengabdian di Dusun Resetlemen Pulau Osi, Seram Bagian Barat, juga menunjukkan bahwa data spasial dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi mengenai persebaran usaha sekaligus mendukung perencanaan pengembangan ekonomi lokal (Adiansyah et al., 2026). Penggunaan pendekatan serupa kemudian diterapkan dalam pemetaan pelaku usaha di Desa Jonggrangan untuk mengidentifikasi persebaran dan karakteristik pelaku usaha di berbagai wilayah desa.

Pelaku Usaha di Desa Jonggrangan tersebar pada seluruh wilayah yang menjadi lokasi pemetaan, yaitu dukuh Jonggrangan, Jonggrangan Baru, Badegan, Botokan, Dendengan, Sunggingan, Pundungan, Jampen, Manahan dan Belang Kulon. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak terpusat pada satu wilayah tertentu, melainkan berkembang secara relatif merata di berbagai lingkungan permukiman desa. Beragam jenis usaha ditemukan meliputi sektor UMKM, perdagangan, jasa, industri rumah tangga, hingga peternakan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, keterampilan, dan peluang pasar yang tersedia. Selain didukung oleh potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh letak Desa Jonggrangan yang strategis dan berdekatan dengan kawasan perkotaan Klaten. Sebaran pelaku usaha yang relatif merata ini menjadi modal penting bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih menyeluruh, menentukan prioritas program pemberdayaan masyarakat, serta merumuskan roadmap pengembangan ekonomi desa yang sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan pada masing-masing wilayah.

3.2. Analisis Sektor Unggulan Desa Jonggrangan

Berdasarkan hasil pemetaan pelaku usaha, sektor UMKM ditetapkan sebagai sektor unggulan Desa Jonggrangan karena mendominasi jumlah unit usaha yang terdata dan mencakup berbagai bidang usaha, seperti kuliner, perdagangan, jasa, serta industri rumah tangga. Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat desa. Oleh karena itu, analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan UMKM sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan ekonomi Desa Jonggrangan. Penggunaan analisis SWOT sebagai instrumen perumusan strategi pengembangan UMKM juga banyak diterapkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, karena mampu memetakan secara sistematis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi daya saing usaha sekaligus merumuskan langkah strategis yang realistis sesuai kondisi lapangan (Maulana, 2025).

Dari aspek Strengths (Kekuatan), Desa Jonggrangan memiliki keragaman jenis usaha yang cukup tinggi, didukung oleh letak wilayah yang strategis di dekat kawasan perkotaan Klaten dan jalur utama Solo–Yogyakarta. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat berkembang secara merata pada berbagai wilayah dusun sehingga menciptakan basis ekonomi lokal yang cukup kuat. Sebagian pelaku usaha juga telah mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.

Pada aspek Weaknesses (Kelemahan), sebagian besar usaha masih berada pada skala mikro dan kecil dengan keterbatasan modal, tenaga kerja, serta kapasitas produksi. Pengelolaan usaha umumnya masih bersifat sederhana dan sebagian besar pelaku usaha belum memiliki strategi pemasaran digital yang optimal. Selain itu, belum adanya integrasi data usaha secara berkelanjutan juga menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi desa.

Dari aspek Opportunities (Peluang), perkembangan teknologi digital dan media sosial membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar (Makigawe & Ikaningtyas, 2025). Kedekatan Desa Jonggrangan dengan pusat perkotaan juga memberikan akses yang lebih baik terhadap konsumen, jaringan distribusi, dan berbagai program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga pendukung UMKM. Keragaman usaha yang dimiliki masyarakat juga berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sementara itu, dari aspek Threats (ancaman), pelaku UMKM di Desa Jonggrangan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan produk sejenis dari daerah lain yang memiliki jangkauan pasar lebih luas. Perubahan tren dan pilihan konsumen yang berlangsung cepat juga menuntut pelaku usaha untuk terus berinovasi agar produk yang ditawarkan tetap diminati pasar. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan meningkatnya persaingan dalam pasar digital berpotensi memengaruhi stabilitas serta keberlanjutan usaha yang dijalankan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan sektor unggulan Desa Jonggrangan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta penguatan kelembagaan usaha. Selain itu, perluasan akses pasar dan pengembangan jejaring kemitraan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Melalui strategi tersebut, UMKM diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Desa Jonggrangan yang berbasis pada potensi lokal.

3.3. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Desa

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemetaan pelaku usaha, dilakukan penyusunan roadmap pengembangan ekonomi Desa Jonggrangan yang bertujuan untuk menyediakan dasar perencanaan pembangunan ekonomi desa yang lebih terarah dan berbasis data. Penyusunan roadmap dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pencatatan pelaku usaha, analisis sektor unggulan, serta sebaran usaha pada setiap wilayah dusun. Roadmap yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas program pengembangan ekonomi masyarakat.

Output utama dari kegiatan ini berupa database pelaku usaha yang memuat informasi pemilik usaha, jenis usaha, lokasi usaha, kondisi usaha, serta potensi pengembangannya. Database tersebut menjadi sumber data yang dapat diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan

kebijakan maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, disusun pula peta digital pelaku usaha Desa Jonggrangan yang menampilkan persebaran berbagai aktivitas ekonomi secara spasial sehingga memudahkan pemerintah desa dalam mengidentifikasi sentralisasi usaha, sektor unggulan, serta wilayah yang memiliki peluang pengembangan ekonomi lebih lanjut.

Untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, hasil pemetaan juga diwujudkan dalam bentuk papan informasi pelaku usaha desa yang ditempatkan di Lokasi strategis yang sering dilalui oleh para warga. Papan informasi tersebut berfungsi sebagai media publikasi dan penyebaran informasi mengenai pelaku usaha yang dimiliki Desa Jonggrangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aset ekonomi lokal sekaligus mendukung transparansi data pembangunan desa. Keberadaan database, peta digital, dan papan informasi pelaku usaha diharapkan dapat menjadi fondasi dalam penyusunan program pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik serta potensi unggulan yang dimiliki Desa Jonggrangan.

3.4. Pelembagaan dan Keberlanjutan Pengelolaan Data

Keberlanjutan hasil kegiatan diarahkan melalui pembagian peran dalam pengelolaan dan pembaruan database pelaku usaha. Berdasarkan hasil diskusi dan penyerahan kegiatan, Sekretaris Desa ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pada tingkat desa. Penetapan tersebut disesuaikan dengan struktur

Pemerintah Desa Jonggrangan yang tidak memiliki jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sehingga pengelolaan database ekonomi desa dipusatkan pada Sekretaris Desa.

Pembaruan data direncanakan dilakukan secara berkala, yaitu setiap semester. Informasi mengenai pelaku usaha baru, perubahan kondisi usaha, maupun usaha yang sudah tidak beroperasi dapat dihimpun melalui kader dusun dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi. Data yang telah diverifikasi selanjutnya diperbarui pada database dan peta digital.

Mekanisme tersebut memberikan pembagian peran antara pengelola data di tingkat desa dan pihak yang membantu memperoleh informasi dari lapangan. Pemerintah desa juga telah memperoleh pendampingan dalam penggunaan Google Maps dan Excel untuk mendukung proses pembaruan data. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya diserahkan dalam bentuk dokumen, tetapi juga diarahkan agar dapat digunakan dan diperbarui oleh pemerintah desa.

Meskipun demikian, penetapan pengelola data masih berdasarkan kesepakatan dalam forum publikasi dan penyerahan hasil serta belum dituangkan dalam Surat Keputusan pemerintah desa. Oleh karena itu, penerbitan SK atau bentuk penugasan resmi menjadi rekomendasi untuk memperkuat pelembagaan pengelolaan data dan memberikan kejelasan tanggung jawab dalam jangka panjang.



Gambar 5. Penyerahan Hasil Kegiatan

Hasil yang diserahkan meliputi database pelaku usaha, peta digital persebaran usaha, papan informasi potensi ekonomi desa, dan roadmap pengembangan ekonomi desa. Tim pengabdian tetap dapat memberikan pendampingan secara konsultatif apabila terdapat kendala teknis, sedangkan tanggung jawab operasional pengelolaan data berada pada pemerintah desa.

3.5. Dampak dan Manfaat Kegiatan

Dampak kegiatan dilihat dari tersedianya informasi ekonomi desa yang lebih terstruktur dan meningkatnya akses Pemerintah Desa Jonggrangan terhadap data pelaku usaha. Sebelum kegiatan dilakukan, informasi mengenai pelaku usaha belum tersusun dalam satu basis data yang terintegrasi sehingga pemanfaatannya untuk perencanaan ekonomi desa masih terbatas. Hasil pemetaan kemudian

mengintegrasikan informasi mengenai identitas, jenis usaha, sektor, dan lokasi pelaku usaha ke dalam database dan peta digital.

Bagi Pemerintah Desa Jonggrangan, hasil tersebut memberikan sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengenali keragaman dan persebaran aktivitas ekonomi masyarakat. Data sebanyak 192 unit usaha yang telah diklasifikasikan berdasarkan sektor memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi desa. Dominasi sektor UMKM dengan 104 unit usaha atau 54,17% dapat menjadi salah satu informasi dasar dalam menentukan arah program pemberdayaan ekonomi desa.

Selain menghasilkan database dan peta, kegiatan juga memberikan pendampingan mengenai pengelolaan dan pembaruan informasi menggunakan Google Maps dan Excel. Pendampingan tersebut diarahkan agar perangkat desa dapat memahami proses pembaruan data ketika terjadi perubahan pada kondisi pelaku usaha. Hasil diskusi dengan pemerintah desa juga menghasilkan pembagian peran dalam pengelolaan data, dengan Sekretaris Desa sebagai pengelola utama dan kader dusun sebagai pihak yang membantu menghimpun informasi dari lapangan.

Dari aspek keberlanjutan, database dan peta digital tidak ditempatkan sebagai luaran yang berhenti setelah kegiatan pengabdian selesai. Pemerintah desa diarahkan untuk melakukan pembaruan data secara berkala sehingga informasi mengenai pelaku usaha dapat tetap relevan. Mekanisme pembaruan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hasil pemetaan dapat terus digunakan sebagai sumber informasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi desa.

Bagi masyarakat, keberadaan peta digital dan papan informasi memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai pelaku usaha lokal. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengenali keragaman usaha yang terdapat di desa serta memperluas akses informasi mengenai produk dan jasa yang tersedia. Pemanfaatan Google Maps juga memberikan media tambahan untuk meningkatkan keterlihatan lokasi usaha kepada pengguna di luar wilayah desa.

Secara keseluruhan, outcome kegiatan terlihat pada tersedianya basis informasi yang dapat digunakan pemerintah desa untuk memahami kondisi ekonomi wilayah, melakukan pembaruan data, serta mengintegrasikan informasi pelaku usaha dalam penyusunan program pengembangan ekonomi. Namun, karena pelembagaan pengelolaan data belum dituangkan dalam bentuk penugasan formal, keberlanjutan hasil kegiatan masih memerlukan penguatan melalui kebijakan pemerintah desa.

4. Kesimpulan

Kegiatan pemetaan pelaku usaha di Desa Jonggrangan berhasil mengidentifikasi 192 unit usaha dan pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah desa. Sektor UMKM menjadi sektor unggulan dengan 104 unit usaha atau 54,17%, disusul sektor jasa sebanyak 57 unit usaha atau 29,69% dan perdagangan sebanyak 23 unit usaha atau 11,98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Desa Jonggrangan memiliki keragaman dan basis ekonomi lokal yang cukup kuat untuk dikembangkan. Pemetaan secara partisipatif juga menghasilkan database pelaku usaha, peta digital persebaran pelaku usaha, papan informasi pelaku usaha desa, serta roadmap pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Luaran tersebut memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa dalam memperoleh informasi ekonomi yang lebih terstruktur sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan penyusunan program pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis berupa penyediaan data spasial dan nonspasial yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi desa berbasis data. Dari sisi pendekatan, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi memperkuat penerapan pendekatan partisipatif dalam pemetaan ekonomi lokal. Keberlanjutan pemanfaatan data turut didukung oleh pelembagaan pengelolaan data kepada Sekretaris Desa (Sekdes) selaku pengelola data tingkat desa, dengan mekanisme pemeliharaan data yang disepakati dilaksanakan secara berkala setiap semester dan dibantu oleh kader dusun. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pembaruan database secara berkala, penguatan kapasitas pelaku UMKM, digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta penguatan kemitraan agar hasil pemetaan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai dasar implementasi roadmap pengembangan ekonomi Desa Jonggrangan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagai bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten yang telah memberikan dukungan, informasi, serta akses selama proses pendataan dan pemetaan pelaku usaha desa. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha Desa Jonggrangan yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam terlaksananya kegiatan pemetaan pelaku usaha dan penyusunan roadmap pengembangan ekonomi Desa Jonggrangan.

Pernyataan

Penggunaan kecerdasan buatan (AI), Penulis menggunakan ChatGPT-4o dan Claude3.5 Sonnet sebagai alat bantu dalam penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan penyempurnaan redaksi. AI tidak digunakan untuk menghasilkan data penelitian, melakukan pengumpulan data, atau menggantikan analisis dan interpretasi penulis. Seluruh isi artikel telah diperiksa, disesuaikan, dan menjadi tanggung jawab seluruh penulis.

Kontribusi penulis. Muhammad Nur Attho'ilah berkontribusi dalam konseptualisasi kegiatan, koordinasi pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan naskah. Sheila Devi Nurhaliza berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan, dokumentasi, dan penyusunan naskah. Dafa Hazril Ilhami berkontribusi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Brian Sofin Ramadhan berkontribusi dalam observasi lapangan dan dokumentasi. Chaerani Azzahra berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Ella Rosa Nur Aghesi berkontribusi dalam pengumpulan data, dokumentasi, dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis terlibat dalam peninjauan dan persetujuan akhir naskah.

Pernyataan pendanaan. Kegiatan ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga pendanaan lainnya.

Konflik kepentingan. Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, analisis data, maupun publikasi artikel ini. **Informasi tambahan.** Tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk artikel ini.

Pernyataan Ketersediaan Data dan Perangkat Lunak

Data yang mendukung hasil kegiatan ini diperoleh melalui pendataan lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, serta verifikasi dan validasi bersama Pemerintah Desa Jonggrangan. Data hasil pendataan berupa database pelaku usaha, data persebaran lokasi usaha, dan dokumen pemetaan dikelola oleh tim pelaksana dan Pemerintah Desa Jonggrangan. Data tersebut tidak tersedia secara terbuka melalui repositori publik karena memuat informasi mengenai pelaku usaha dan lokasi usaha. Akses terhadap data dapat diberikan secara terbatas berdasarkan permintaan yang wajar dan dengan persetujuan pihak terkait. Pengolahan dan pemetaan data dilakukan menggunakan perangkat lunak pemrosesan data dan pemetaan digital yang digunakan selama kegiatan. Tidak terdapat perangkat lunak khusus yang dikembangkan dalam kegiatan ini.

Referensi

- [1] Adiansyah, F. R., Banyal, N., Simbolon, R. M., Lautantia, A. W., Tuguiha, R., Ongirwalu, L. G., Reliubun, W. F., Ilelapotoa, S. S., Masawunu, Y., & Pattiradjawane, V. (2026). Pemetaan Partisipatif Berbasis GIS Untuk Digitalisasi Sebaran UMKM di Dusun Resettlement Pulau Osi, Seram Bagian Barat. *Jurnal Abdidas*, 7(3), 377–385.
- [2] Budiantoro, R. A., Aji, M. R. W., Prayogi, J., & Susanti, A. (2023). SI Desa (Sistem Informasi Desa). *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 233–247. <https://doi.org/10.21787>
- [3] Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305750X(94)90003-5)
- [4] Chandra, G. (1994). Participatory Rural Appraisal. *Issues and Tools for Social Science Research in Inland Fisheries*, 163, 286–302.
- [5] Indonesia, B.S. (2023). KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023. <https://www.bps.go.id/en/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandengbpslakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023>
- [6] Makigawe, N. S., & Ikaningtyas, M. (2025). Revolusi Digital UMKM: Membuka Peluang Pasar Lebih Luas Melalui Media Sosial dan E-commerce di Desa Kedungjambe Digital Revolution of MSMEs: Opening Wider Market Opportunities Through Social Media and E-commerce in Kedungjambe Village Universitas Pemb. Masyarakat Mandiri: *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Lokal*, 2(1), 62–75. <https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v2i1.1073>
- [7] Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? (World Bank (ed.)). <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- [8] Maulana, R. (2025). Strategi Pengembangan Usaha UMKM dengan Analisis SWOT. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(3), 223–235.
- [9] OECD. (2021). Applying Evaluation Criteria Thoughtfully.
- [10] Rahmanida, S., Rahmawati, R., Nikmah, R., Naasyiroh, R., & Rahmawati, R. (2025). Penguatan Identitas dan Aksesibilitas UMKM melalui Digitalisasi Lokasi Usaha di Google Maps sebagai Strategi Digital dalam Meningkatkan Jangkauan Konsumen. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 147–153. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i1.2177>
- [11] Sitorus, J. H., Achmad, F., Faisal, A., & Suhartono. (2021). Pemetaan Sebaran Umkm Berbasis Webgis di Desa Pasuruan, Lampung Selatan. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(1), 135–144.
- [12] Surdia, R. M., Pirngadi, B. H., Raharja, A. B., & Sutansyah, L. (2022). Inisiasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial dalam Penyusunan Peta Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 312–317.
- [13] UMKM, K. (2023). Complete 2023 MSME Data Collection. SMEsta News. <https://smesta.umkm.go.id/news/pendataan-lengkap-kumkm-2023>